



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam upaya mengakomodir beberapa jenis pelayanan perizinan berusaha yang masih dikelola oleh perangkat daerah khususnya perizinan sektor kesehatan agar dapat dikelola secara terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yaitu:

1. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 70);

Ketentuan dalam Lampiran antara baris 57 dan 58 disisipkan satu baris yaitu baris 57a. sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 24 Agustus 2020

The seal is circular with a blue border containing the text "BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU" and two stars. In the center is a Garuda emblem.

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,
M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 25 Agustus 2020

The seal is circular with a blue border containing the text "PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU" and "SETDA".

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 58

h

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 58 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	SEKTOR	JENIS PERIZINAN BERUSAHA		KETERANGAN
1	2	3		4
1	PENANAMAN MODAL	1	DIHAPUS	-
		2	DIHAPUS	-
2	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	IZIN USAHA
		4	SURAT IZIN PEIL BANJIR	IZIN USAHA
		5	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	IZIN USAHA
		6	IZIN RENCANA FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUSUN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		7	IZIN PENGUBAHAN RENCANA FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUSUN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		8	PENGESAHAN PERTELAAN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		9	SERTIFIKAT HAK MILIK RUMAH SUSUN (HMRS) A/N DEVELOPER	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
	10	SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN (HMSRS) A/N PEMBELI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL	
3	PERINDUSTRIAN	11	IZIN USAHA INDUSTRI	IZIN USAHA
		12	IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI	IZIN USAHA
		13	IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI	IZIN USAHA

1	2	3	4	
		14	IZIN PERLUASAN USAHA KAWASAN INDUSTRI	IZIN USAHA
		15	TANDA DAFTAR INDUSTRI	-
		16	REKOMENDASI IZIN USAHA INDUSTRI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
4	JASA LAINNYA	17	IZIN REKLAME	-
5	PERHUBUNGAN	18	IZIN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR	IZIN USAHA
		19	IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG	IZIN USAHA
		20	IZIN PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN	IZIN USAHA
		21	IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	IZIN USAHA
		22	PERSETUJUAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINTAS ANTAR PROVINSI DAN/ATAU ANTAR NEGARA	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		23	PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		24	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		25	IZIN PELABUHAN UMUM	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		26	PENETAPAN TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.

1	2	3		4
		27	IZIN MENDIRIKAN TEMPAT TINGGAL LANDAS DAN MENDARAT HELIKOPTER	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
6	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	28	IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	IZIN USAHA
		29	IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN	IZIN USAHA
		30	IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		31	IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA (SPK)	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		32	IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		33	IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DENGAN MODAL ASING	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		34	TANDA PEMBERIAN PEMBUATAN FILM	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		35	TANDA DAFTAR USAHA PERFILMAN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
7	KESEHATAN	36	SERTIFIKAT PRODUKSI INDUSTRI FARMASI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		37	SERTIFIKAT PRODUKSI INDUSTRI FARMASI BAHAN OBAT	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1	2	3	4
		38 SERTIFIKAT DISTRIBUSI PEDAGANG BESAR FARMASI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		39 SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG PEDAGANG BESAR FARMASI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		40 SERTIFIKAT PRODUKSI INDUSTRI OBAT TRADISIONAL /INDUSTRI EKSTRAK BAHAN ALAM (IEBA)	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		41 SERTIFIKAT PRODUKSI USAHA KECIL DAN MIKRO OBAT TRADISIONAL	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		42 SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		43 SERTIFIKAT HIGIENE SANITASI PANGAN (LAIK SEHAT)	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		44 SERTIFIKAT PRODUKSI KOSMETIKA	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		45 IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA (PRT) ALAT KESEHATAN DAN PKRT	IZIN USAHA
		46 IZIN CABANG DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		47 IZIN TOKO ALAT KESEHATAN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		48 IZIN EDAR ALAT KESEHATAN, ALAT KESEHATAN DIAGNOSTIK IN VITRO DAN PERBEKALAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1	2	3	4
		49 SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN PKRT	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		50 SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		51 SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CPAKB)	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		52 SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN PKRT YANG BAIK (CPPKRTB)	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		53 SERTIFIKAT CARA DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN YANG BAIK (CDAKB)	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		54 PENDAFTARAN PENYELENGARAAN SISTEM ELEKTRONIK FARMASI	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		55 IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT	IZIN USAHA
		56 IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		57 IZIN OPERASIONAL KLINIK	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		57a. IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		58 IZIN INSTITUSI PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		59 IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KLINIK UMUM DAN KHUSUS	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		60 IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM PENGOLAHAN SEL PUNCA	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1	2	3	4
		61 IZIN OPERASIONAL BANK JARINGAN DAN/ATAU SEL PUNCA	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		62 IZIN APOTEK	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		63 IZIN TOKO OBAT	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		64 IZIN PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		65 IZIN PRAKTIK DOKTER	IZIN PRAKTIK
		66 IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	IZIN PRAKTIK
		67 IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP	IZIN PRAKTIK
		68 IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL	IZIN OPERASIONAL
		69 IZIN BIDAN	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		70 IZIN PERAWAT	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		71 REKAM MEDIS	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		72 AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		73 PENATA ANASTESI	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		74 IZIN ANALIS KESEHATAN	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		75 IZIN FISIOTERAPIS	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		76 IZIN APOTEKER	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK

1	2	3		4
		77	IZIN PERAWAT GIGI	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		78	IZIN RADIOGRAFER	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		79	IZIN REFRAKSIONIS OPTISIEN	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		80	IZIN TENAGA GIZI	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		81	IZIN TENAGA SANITARIAN	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
		82	IZIN TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	IZIN KERJA ATAU IZIN PRAKTIK
8	PERDAGANGAN	83	IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP)	IZIN USAHA
		84	TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		85	TANDA DAFTAR GUDANG	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		86	SURAT KETERANGAN PENGE CER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		87	SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUM DI TEMPAT MB GOL A	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		88	TANDA DAFTAR PELAKU USAHA DISTRIBUSI- BARANG KEBUTUHAN POKOK (TDPUD- BAPOK)	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1	2	3		4
		89	PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG, KONVENSI DAN ATAU SEMINAR DAGANG	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		90	SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
9	PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)	91	IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM	IZIN USAHA
		92	IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)	IZIN USAHA
		93	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		94	IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		95	IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
10	PARIWISATA	96	TANDA DAFTAR PARIWISATA	IZIN USAHA
11	PERTANAHAN	97	IZIN LOKASI	IZIN USAHA
12	KETENAGAKERJAAN	98	SURAT IZIN USAHA LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA	IZIN USAHA
		99	IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)	IZIN USAHA
13	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100	IZIN PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG (IUPK SILVOPASTURA)	IZIN USAHA
		101	IZIN PEMANFAATAN KAWASAN SILVO FISHERY PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG (IUPK SILVO FISHERY)	IZIN USAHA

1	2	3	4	
		102	IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUPHHBUK) PADA HUTAN PRODUKSI	IZIN USAHA
		103	IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI	IZIN USAHA
		104	IZIN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	IZIN USAHA
		105	SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)	IZIN USAHA
		106	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK USAHA JASA	IZIN USAHA
		107	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL
		108	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	IZIN USAHA
		109	IZIN LINGKUNGAN	IZIN USAHA

1	2	3		4
14	PERTANIAN	110	IZIN USAHA PERKEBUNAN	IZIN USAHA
		111	IZIN USAHA TANAMAN PANGAN	IZIN USAHA
		112	IZIN USAHA HORTIKULTURA	IZIN USAHA
		113	IZIN USAHA PETERNAKAN	IZIN USAHA
		114	PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN	IZIN USAHA
		115	PENDAFTARAN USAHA TANAMAN PANGAN	IZIN USAHA
		116	PENDAFTARAN USAHA BUDIDAYA HORTIKULTURA	IZIN USAHA
		117	IZIN KLINIK HEWAN	IZIN USAHA ATAU IZIN OPERASIONAL
		118	IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN	IZIN PRAKTIK
		119	IZIN PENJUALAN OBAT HEWAN	-
		120	IZIN RUMAH POTONG HEWAN	-
15	PERIKANAN	121	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)	-
		122	TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL	-
		123	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)	IZIN USAHA
		124	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)	IZIN USAHA
		125	TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

1	2	3		4
		126	TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL



BUPATI KAPUAS HULU, M

A. M. NASIR

[Handwritten mark]